

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**EGI RANDI ARBRIAN
NPM : 1421020065**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

EGI RANDI ARBRIAN
NPM : 1421020065

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Awalnya dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013, proses pembubaran ormas melalui beberapa tahap seperti upaya persuasif terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi administratif. Setelah disahkannya UU No 16 Tahun 2017 pengganti UU No 17 Tahun 2013 sebagaimana yang telah tercantum, bahwasannya ormas yang dianggap mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukumnya oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari sini dapat terlihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan sepihak itu sendiri merupakan tindakan yang kurang tepat, karena belum tentu ormas yang dibubarkan sepihak oleh pemerintah itu benar-benar salah sebelum melalui proses peradilan terlebih dahulu.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana proses pembubaran Ormas dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses pembubaran Ormas dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembubaran ormas di Indonesia dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses pembubaran ormas di Indonesia. Sementara kegunaan penelitian ini secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang dan secara praktis penelitian ini dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pembubaran ormas di Indonesia serta untuk memenuhi syarat akademik.

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dan sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif* dan *deskriptif-analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu al-Qur'an, dan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan sumber bahan hukum sekunder yaitu Sumber tidak diperoleh secara langsung, mencangkup dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Proses pembubaran ormas Dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu dengan memberikan peringatan tertulis namun hanya satu kali, kemudian jika ormas tidak menghiraukan peringatan tersebut maka Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan sanksi penghentian kegiatan, bahkan Menteri Hukum dan HAM dapat mencabut izin atau status badan hukum ormas tersebut tanpa melalui proses pengadilan. Dalam Islam mengenai pembubaran organisasi masyarakat tidak diatur secara jelas, namun dalam peraktiknya, setiap perkara itu diputus melalui proses peradilan. Pada masa Rosululah dan Sahabat, khalifah sendiri yang memutus setiap perkara, namun untuk periode selanjutnya kewenangannya diserahkan kepada hakim yang sudah diangkat oleh khalifah.



iv

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Nama : EGI RANDI ARBRIAN

NPM : 1421020065

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 197009011997031002

Pembimbing II

Dr. Jayusman, M.Ag

NIP. 197411062000031002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I

NIP. 195808171993031002



v

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

A. Laili H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

**Simpul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**, disusun
oleh **EGI RANDI ARBRIAN**, NPM: 1421020065, Jurusan:
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam
sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum pada
hari tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Sekretaris: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji II : Dr. Alamsyah S.Ag., M.Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Dr. Alamsyah S. Ag., M. Ag
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisaa: 58).*¹

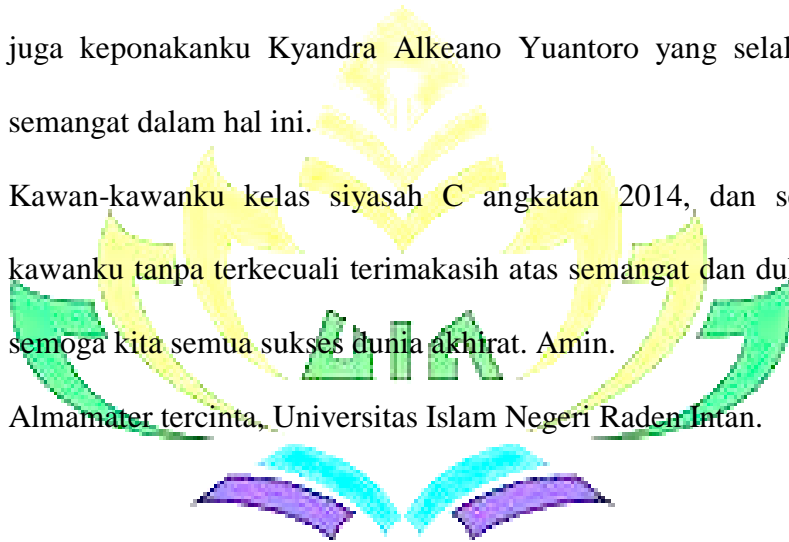


¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 128.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, Bapak Maryadi dan Ibu Sukini, terima kasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, serta ketulusan dan pengorbanan yang selalu menjadi motivasiku hingga saat ini.
2. Saudaraku tercinta kakakku Shinta Hatalia, Malida Risa Prasmonika dan juga keponakanku Kyandra Alkeano Yuantoro yang selalu memberiku semangat dalam hal ini.
3. Kawan-kawanku kelas siyasah C angkatan 2014, dan semua kawan-kawanku tanpa terkecuali terimakasih atas semangat dan dukungan kalian semoga kita semua sukses dunia akhirat. Amin.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan.

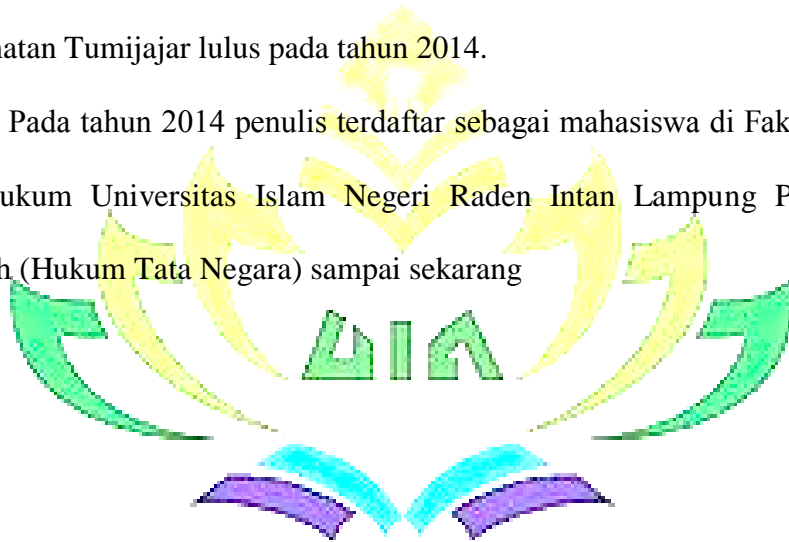


RIWAYAT HIDUP

Egi Randi Arbrian lahir di Desa Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 Mei 1996, anak ke-tiga dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Maryadi dan Ibu Sukini.

Pendidikan penulis di mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Dayamurni lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Tumijajar Kecamatan Tumijajar lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Tumijajar Kecamatan Tumijajar lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) sampai sekarang



KATA PENGANTAR

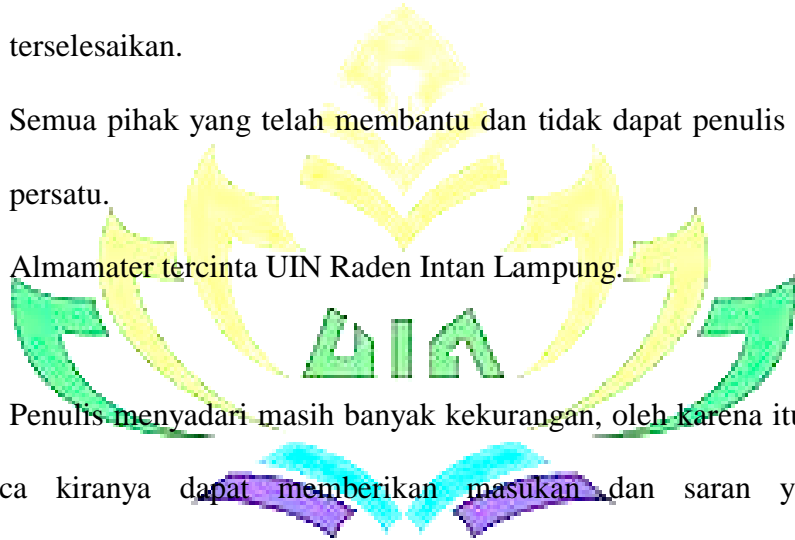
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia”

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Mukri, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS., M.Sos. selaku Ketua Program Studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Jayusman M.Ag. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberi motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, staff, dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi baik secara moril maupun materil.
7. Kakak-kakak yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.
8. Teman-teman seperjuanganku Siyasah C angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan, saran, dan do'a sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 24 Juni 2019

Egi Randi Arbrian
NPM.1421020065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Sejarah & Bentuk-bentuk Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	14
B. Peraturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia	23
C. Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan dalam Islam	32

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Prosedur Mendirikan Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	58
B. Prosedur Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam	

Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	61
---------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV ANALIS DATA

A. Pembubaran Ormas Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	66
B. Pembubaran Ormas Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menurut Pandangan Hukum Islam	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Tinjauan, istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.²
2. Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.³
3. Pembubaran ialah proses, cara, perbuatan membubarkan.⁴
4. Organisasi kemasyarakatan yang di sebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 951

³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 2

⁴ Agus Sulistyono Dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cv. Surakarta, 2008, h. 127

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

5. UU No 16 Tahun 2017 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang.⁶
6. Indonesia ialah nama Negara kepulauan di asia tenggara yang terletak diantara benua asia dan benua Australia.⁷

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah pandangan yang berpijak pada syari'at Islam Terhadap perbuatan membubarkan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

⁶ *Ibid.*

⁷ Agus Sulistyono Dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cv. Surakarta, 2008, h. 251

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objektif

Setelah perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, pembubaran ormas dilakukan sepihak dan tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada upaya untuk melakukan pembuktian bahwa ormas tersebut belum tentu terbukti melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut.

Sedangkan ormas dalam Pandangan Islam mengalami banyak peningkatan kesadaran dan wawasan keislaman muslim, karena terkuaknya kenyataan bahwa organisasi, yayasan, atau perkumpulan sosial adalah perkara yang tidak bisa diingkari oleh organisasi. Selama aktivitas Organisasi-organisasi tersebut dalam rangka menolong, membelanya dan mendukung al-haq. Dengan syarat, anggotanya bebas dari sifat fanatik kelompok yang tercela, dan dari fitnah harta, dan hal-hal yang memperburuk dakwah di setiap tempat.

2. Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang peneliti pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Organisasi kemasyarakatan yang di sebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Setelah perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017, proses pembubaran ormas mengalami perubahan.

Awalnya dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013, proses pembubaran ormas melalui beberapa tahap seperti upaya persuasif terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi administratif. Sebagaimana tercantum dalam pasal 60 dan 61 yaitu sebagai berikut,

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan. terdiri dari, peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.⁹

Kemudian pemerintah mengeluarkan perppu No 2 tahun 2017, dalam hal ini pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan perppu no 2 tahun 2017, yaitu aturan yang undang-undang yang tidak lagi memadai.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang.

⁹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 60 dan 61.

Ada tiga alasan pemerintah menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017, yakni:

1. Tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 138/PPU-VII/2009. "Presiden bisa mengeluarkan perppu atas dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang"
2. Terkait aturan hukum yang belum memadai. Perppu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.
3. Perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.¹⁰

Setelah disahkannya UU No 16 Tahun 2017 pengganti UU No 17 Tahun 2013 sebagaimana yang telah tercantum, bahwasannya ormas yang dianggap mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukumnya oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam pasal berikut:

Yang dimaksud dengan "penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum" adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang azas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

¹⁰ Kompas.com, Ini tiga pertimbangan Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>, diakses tanggal 07 Desember 2018.

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.¹¹

Contohnya seperti pembubaran ormas HTI, pemerintah membubarkan HTI pada tanggal 19 Juli 2017 lalu, dengan mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut. HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri, dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu “tidak bertentangan dengan Pancasila dan Uud 1945”. HTI disebut mendakwakan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya. Selain itu, HTI dianggap berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan NKRI. Menariknya pemerintah mencabut status badan hukum HTI dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, yang mengubah sejumlah ketentuan pada UU Ormas.¹²

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau

¹¹ Undang-undang No 16 Tahun 2017 Pasal 61.

¹² BBC News, HTI dinyatakan ormas terlarang, Pengadilan tolak gugatan, <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/Indonesia/amp/Indonesia-44026822>, diakses tanggal 05 Maret 2019.

paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafty al-haraj*)
3. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
4. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*)¹³

Namun dalam pelaksanaannya pembubaran ormas dilakukan sepihak dan tanpa melalui musyawarah dan proses peradilan terlebih dahulu membuat pemerintah seakan memiliki kekuasaan dan kendali penuh atas seluruh ormas yang ada di Indonesia, dan itu merupakan bentuk pembatasan atas hak berkumpul dan berserikat, sehingga dapat menimbulkan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atas ormas yang ada di Indonesia.

Dengan ditetapkannya perppu no 2 tahun 2017 menjadi uu no 16 tahun 2017, maka secara langsung pemerintah mendapatkan payung hukum yang sangat kuat yang digunakan untuk mengontrol ormas-ormas yang berbeda pandangan dengan pemerintah, maka dari itu dengan berdalih pemberantasan ormas anti pancasila, pemerintah dapat dengan sewenang-wenang melumpuhkan ormas-ormas yang berseberangan dengan pemerintah, dengan dalih tidak sesuai dengan Pancasila atau anti Pancasila, dan itu dijadikan senjata ampuh pemerintah untuk melumpuhkan ormas yang menjadi lawan politik pemerintah.

¹³ Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, AL-'ADALAH Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67.

Dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 54 dan Surah an-Nisa ayat 58 Allah swt berfirman:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.* (Q.S. al-A'raf: 54).¹⁴

Dari firman di atas sudah jelas bahwasannya, masalah hukum (keputusan) dan syari'at (peraturan) selayaknya hanya disetujui oleh Allah swt semata, tidak sesuai dengan kehendak manusia yang berubah, atau sesuai dengan mashlahat-mashlahat yang tidak perlu, atau untuk adat istiadat yang disetujui oleh suatu kelompok atau beberapa kelompok, tetapi tidak berpedoman kuat pada syari'at Allah swt.

¹⁴ Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Alfatih*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009) h . 57

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menjalankan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*” (Q. S an-Nisa: 58)¹⁵

Dari firman di atas sudah jelas bahwasannya ketika menetapkan hukum haruslah adil, namun terdapat ketidakadilan dalam penetapan peraturan tersebut yaitu dengan sepihak pemerintah memutuskan peraturan tentang pembubaran ormas, di mana pembubaran ormas bisa langsung dilakukan tanpa proses peradilan.

Dan juga akan berdampak terhadap ormas-ormas yang lain, di mana akan sangat mudah pemerintah mengontrol ormas dengan peraturan tersebut, dan hal yang paling buruk bisa terjadi pemerasan dan pengancaman oleh oknum pejabat pemerintah terhadap ormas guna mendapatkan keuntungan.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan sepihak itu sendiri merupakan tindakan yang kurang tepat, karena belum tentu ormas yang dibubarkan sepihak oleh pemerintah itu benar-benar salah sebelum melalui proses peradilan terlebih dahulu.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, h. 87

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaturan tentang pembubaran ormas dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang.

- b. Secara praktis penelitian ini dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pembubaran ormas di Indonesia serta untuk memenuhi syarat akademik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat literatur yang sesuai dengan pokok bahasan yang dalam hal ini yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembubaran ormas dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, seperti al-Qur'an dan Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, serta literatur lainnya yang mempunyai permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran tertulis.

- b. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁷ Dan

¹⁶ Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 15

deskriptif-analisis, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁸

Dengan mengadakan pendekatan secara *yuridis normatif* dan *deskriptif-analisis*, dapat memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu memperoleh gambaran tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembubaran ormas dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber yang diperoleh penelitian secara langsung yang berasal dari al-Qur'an, dan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber tidak diperoleh secara langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literature yang tersedia diperpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang menyatukan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literature lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹

5. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Sejarah dan Bentuk-bentuk Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

1. Pengertian Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat yang kita kenal (ORMAS) pada dasarnya adalah organisasi social atau *social organizatio*.²⁰ secara etimologi organisasi masyarakat terdiri dari dua kata yaitu organisasi yang berarti, kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu.²¹ Sementara masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²²

Sedangkan menurut Undang-undang No 16 tahun 2017 Ormas adalah Organisasi kemasyarakatan yang kemudian disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²³

²⁰ Kajian, Volume 10, masalah 3, *pusat pengkajian dan pelayanan informasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI*, 2005. h. 22.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op., Cit*, h. 467.

²² *Ibid*, h. 437.

²³ Undang-undang No 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1.

2. Sejarah Organisasi Masyarakat

Keberadaan organisasi massa ini muncul seiring dengan tumbuhnya organisasi masyarakat sipil (*Civil Society*). Sejarah perkembangan masyarakat sipil sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero (106-43 SM), seorang orator dan pujangga Roma. Cicero yang memulai menggunakan istilah *societas civilis* dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian *Civil Society* dianggap sama dengan pengertian negara (*the state*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Maka ketika JJ Rousseau (1712-1778) menggunakan istilah *Societes Civiles*, ia memahaminya sebagai negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.²⁴

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *Civil Society* kemudian dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergesurnya rezim-rezim absolut. Para pemikir politik yang mempelopori perbedaan ini antara lain Adam Ferguson, Johann Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyès dan Tom Paine. Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep *Civil Society* pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yang menekankan aspek kemandirian dan perbedaan

²⁴ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Organisasi Masa, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_masa, diakses tanggal 06 Maret 2019.

posisi sedemikian rupa sehingga menjadi anti tesis dari state. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang mengajukan tesis bahwa *Civil Siociety* justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Hegel rupanya ingin mengembalikan posisi negara sebagai entitas yang lebih berkuasa. *Civil Siociety*, bagi Hegel, merupakan kelas borjuis, dan munculnya *Civil Siociety* adalah tidak lepas dari munculnya revolusi industri dan kapitalisme.²⁵

Indonesia memiliki tradisi kuat *Civil Siociety* (Masyarakat Madani). Bahkan jauh sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam merebut kemerdekaan. Selain berperan sebagai organisasi penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis Islam, seperti Syarikat Islam (SI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen *Civil Siociety* yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Sifat kemandirian dan kesukarelaan para pengurus dan anggota organisasi tersebut merupakan karakter khas dari sejarah Masyarakat Madani di Indonesia.²⁶

Masyarakat madani, seperti halnya bentuk masyarakat lain, memiliki ciri-ciri tersendiri. Menurut Nurcholis, masyarakat madani memiliki ciri-ciri di antaranya:

²⁵ *Ibid*

²⁶ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 227-228.

1. Keadilan
2. Keterbukaan
3. Demokratis
 - a. Kebebasan menyatakan pendapat
 - b. Kebebasan berkumpul
 - c. Kebebasan berserikat
4. Persamaan

Akar sejarah *Civil Society* di Indonesia, bisa dirunut semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya, antara lain adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20. Gejala ini menandai mulai bersemainya *Civil Society* di negeri ini. Paska kemerdekaan (tahun 1950 an), pertumbuhan *Civil Society* di Indonesia mengalami kemajuan. Pada saat itu, organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Selain itu, Indonesia yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elit penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer.²⁷

²⁷ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 248-249.

Sayangnya, *Civil Siociety* yang mulai berkembang itu segera mengalami penyurutan terus menerus. Bahkan akibat dari krisis-krisis politik pada level negara ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala massif, distorsi-distorsi dalam masyarakatpun meruyak. Hal ini pada gilirannya menghalangi kelanjutan perkembangan *Civil Siociety*. Kondisi *Civil Siociety* demikian mencapai titik yang paling parah di bawah rezim Sukarno. Yang ditopang oleh upaya penguatan negara, dilakukan dengan dukungan elit kekuasaan yang baru. Di bawah rezim demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra revolusi. Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial. Orde Baru yang menggantikan rezim Sukarno membawa dampak tersendiri bagi perkembangan *Civil Siociety* di Indonesia. Pada dataran sosial-ekonomi, akselerasi pembangunan lewat industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga telah mendorong terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris.²⁸

Pada wilayah politik, Orba melanjutkan upaya sebelumnya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Ini berakibat pada merosotnya kemandirian dan partisipasi politik masyarakat. Penetrasi negara yang kuat dan

²⁸ *Ibid*, h. 249.

jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan, telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada. Paradoks yang lain adalah soal fungsi pers. Perkembangan *Civil Society* di Barat, seperti dikatakan Habermas, amat ditentukan oleh perkembangan ruang publik bebas. Praktik pembredelan pers sering dilakukan oleh negara.²⁹

3. Bentuk-bentuk Ormas

a. Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926)³⁰ di Surabaya. Pendirinya adalah alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur salah satunya adalah KH. Hasyim Asy'ari.

Didirikan organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh dua tujuan:

- 1) Untuk mengimbangi Komite Khilafat yang secara berangsur-angsur jatuh ketangan pembaharuan.
- 2) Untuk berseru kepada *ibnu saud*, penguasa baru di tanah Arab agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat di teruskan.³¹

b. Muhammadiyah

Sedangkan lahirnya Muhammadiyah, pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 (18 November 1912) di Yogyakarta, dan sejarah hidup pendiri awalnya yakni KH. Ahmad Dahlan, karena dari pemikiran dan usaha beliau lahirlah embrio organisasi yang kemudian setelah mengalami perputaran waktu berubah menjadi seperti dan sebesar sekarang ini.

²⁹ *Ibid*, h. 250.

³⁰ Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A., *Dileman NU, Ditengah Badai Pragmatisme Politik*, (Cet. 1; Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2004), h 10-11

³¹ M. Din Syamsudin, *Muhammadiyah Kiri dan Esok*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h 42

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh kalangan Muhammadiyah yang menjadi faktor didirikannya organisasi ini Oleh KH. Ahmad Dahlan antara lain:

- 1) Ia melihat bahwa umat Islam tidak memegang teguh al-Qur'an dan Sunah dalam beramal sehingga takhayul atau syirik merajarela, akhlak masyarakat runtuh. Akibatnya, amalan-amalan mereka merupakan campuran antara yang benar dan salah. Sehingga diketahui, orang-orang Indonesia sudah beragama Hindu sebelum datangnya islam. Menurut catatan sejarah, agama Hindu dibawa pertama kali masuk Indonesia oleh pedagang-pedagang India sehingga pengaruhnya tidak lepas dari umat islam.
- 2) Lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada pada waktu itu tidak efisien. Pesantren, yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah, pada masa itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada waktu itu pendidikan di Indonesia telah terpecah dua, yaitu pendidikan secular yang dikembangkan oleh Belanda dan pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Akibatnya terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara golongan yang mendapat pendidikan secular dan golongan yang mendapat pendidikan pesantren. Ini juga mengakibatkan terpecah rasa persaudaraan (Ukhuwah Islamiyah) di kalangan umat Islam dan semakin melemahnya kekuatan islam.

- 3) Kemiskina menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam, yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Orang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri, dan bahkan banyak ulama lupa mengingatkan umatnya bahwa islam mewajibkan zakat bagi si kaya, sehingga hak-hak orang miskin terabaikan.
- 4) Aktivitas misi Katolik dan Protestan sudah giat beroperasi sejak awal abad ke-19 dan bahkan sekolah-sekolah misi mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda.
- 5) Kebanyakan umat Islam hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berfikir secara dogmatis. Kehidupan umat islam masih diwarnai konservatisme, formalism, dan tradisionalisme.³²

c. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) berdiri tahun 1928 atas inisiatif dari Syeikh Sulaiman Ar-Rasuly di Candung Bukit Tinggi pada tanggal 5 Mei 1928. Pertemuan itu diakhiri oleh sejumlah kaum tua, diantaranya Syeikh Abbas al-Qadhi, Syeikh Muhammad Djamil Djaho, Syeikh Wahid ash-Shahily dan ulama kaum tua lainnya. PERTI adalah mewakili kubu tradisional berbasis pedesaan, agraris dan yang berbasis urban/kota, pedagang atau pegawai.³³

Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda atau modernis dalam gerakan dakwahnya, maka kaum tua pun mulai bergerak, mereka melakukan reaksi yang sama, yaitu dengan menerbitkan majalah.

³² Ensiklopedia Islam, Jilid III, *loc.cit.*

³³ <http://www.sejarah+berdirinya+perti>

Diantara majalah diterbitkan adalah majalah *Suluh Melaju* dipadang (1013), al-Mizan, (lain pula) 1928 dan *Suarti* (suara parti) dalam tahun 1940. Pada tahun 1935 diadakan rapat di Candung Bukit Tinggi yang menunjuk H. Siradjudin Abbas sebagai ketua pengurus besar Parti. Pada masa kepengurusan ini, disusun AD dan ART serta dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu: *Pertama*, berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu. *Kedua*, menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan. *Ketiga*, memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru, sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah. *Keempat*, memperkukuh silaturahmi sesama anggota. *Kelima*, memperkukuh dan memperkuat 'adat nan kawi, syara' nan lazim' dalam setiap negeri.³⁴

d. Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir (HT) atau *Liberation Party* (Partai Pembebasan) merupakan organisasi politik Islam ideology berkala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *Khilafah Islamiyyah*. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977 M), yang secara resmi dipublikasikannya pada tahun 1953.³⁵

Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir tahun 1973, serentak di Iraq, Sudan, Tunisia, Aljazair pada

³⁴ Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES. 1974) h 64

³⁵ Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, (Bogor: Al-Izzah Press, 2002), h.

tahun 1973, namunnya semuanya gagal. Sejak saat itulah, Hizbut Tahrir mulai merubah strategi perjuangannya dengan lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.³⁶

B. Peraturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Pengaturan tentang ormas di Indonesia awalnya di atur oleh Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan di mana dalam undang-undang tersebut di atur tentang pembekuan dan pembubaran organisasi masyarakat. Dalam hal ini di atur dalam pasal 13 sampai 17 yaitu sebagai berikut:

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi kemasyarakatan apabila organisasi kemasyarakatan:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum
2. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah
3. Memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara.³⁷

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan, maka pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan. Pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.³⁸

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme-Marxisme-

³⁶ *Ibid*, h. 5-6.

³⁷ Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 13

³⁸ Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 14 dan 15

Leninisme serta ideology, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.³⁹

Tata cara pembekuan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 di atur dengan peraturan pemerintah.⁴⁰

Kemudian lahirlah Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan undang-undang No 8 tahun 1985, Undang-undang ini terdiri dari XIX BAB dan 87 Pasal.

Pengaturan tentang pemberian sanksi terhadap ormas yaitu sebagai berikut, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan. Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran.⁴¹

Sanksi administratif terdiri atas peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.⁴²

Peringatan tertulis terdiri atas peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga. Peringatan tertulis diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling

³⁹ Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 16

⁴⁰ Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 17

⁴¹ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 60.

⁴² Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 61.

lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.⁴³

Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.⁴⁴

Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa, penghentian bantuan dan/atau hibah, dan/atau penghentian sementara kegiatan. Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.⁴⁵

Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah

⁴³ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 62

⁴⁴ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 63.

⁴⁵ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 64.

berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan. Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya⁴⁶

Sanksi penghentian sementara kegiatan dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas. Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.⁴⁷

Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar. Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar. Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.⁴⁸

Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. Sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya

⁴⁶ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 65.

⁴⁷ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 66.

⁴⁸ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 67

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Sanksi pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.⁴⁹

Pencabutan status badan hukum Ormas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencabutan status badan hukum Ormas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁵⁰

Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan pembubaran Ormas diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan. Permohonan harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima. Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas. Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima

⁴⁹ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 68.

⁵⁰ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 69.

secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang. Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.⁵¹

Permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. Jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan pembubaran Ormas harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵²

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵³

Putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi, salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.⁵⁴

⁵¹ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 70.

⁵² Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 71.

⁵³ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 72.

⁵⁴ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 73.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak. Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak. Permohonan kasasi didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran Ormas. Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.⁵⁵

Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima. Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu

⁵⁵ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 74.

paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.⁵⁶

Dalam hal kewajiban tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi. Penyampaian surat keterangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.⁵⁷

Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. Permohonan kasasi harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.⁵⁸

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus. Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

⁵⁶ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 75.

⁵⁷ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 76.

⁵⁸ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 77.

bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.⁵⁹

Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya tidak memenuhi ketentuan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembekuan izin operasional, pencabutan izin operasional, pembekuan izin prinsip, pencabutan izin prinsip, dan/atau sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Ormas berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

⁵⁹ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 78.

⁶⁰ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 79

⁶¹ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 80.

Selanjutnya pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas, karena situasinya dianggap genting sehingga perlu dikeluarkannya Perppu, kemudian lahir Undang-undang No 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Jadi yang membedakan yaitu dalam Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan harus sudah ada keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan. Sedangkan dalam Undang-undang No 16 tahun 2017 Organisasi Kemasyarakatan bahwa Menteri Hukum dan HAM dapat mencabut izin atau status badan hukum ormas tersebut tanpa melalui proses pengadilan.

C. Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Sejarah Islam

1. Menurut al-Qur'an

Membentuk organisasi atau perkumpulan adalah perkara Muamalah dan Muamalah itu hukum asalnya mubah. Dan membentuk organisasi atau perkumpulan untuk berdakwah dan tolong menolong dalam kebaikan, sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2).⁶²

Dengan jelas ayat di atas memuat kewajiban saling membantu di antara kaum mukminin untuk menegakan agama dan larangan bagi mereka untuk bekerjasama dalam menodainya. Bukan sebaliknya yaitu malah melemahkan semangat beramal orang, mengejek orang yang berusaha konsisten dengan syari'at maupun menjadi dalang tersebarnya perbuatan maksiat di tengah masyarakat.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 156.

Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashahah* maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru saat shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Maka dari itu salah satu tujuan dari ormas selain untuk wadah menyampaikan aspirasi, ormas juga diharapkan dapat mengontrol jalannya pemerintahan.⁶³

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A’la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

1. *Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.*
2. *Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.*

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 241

3. *Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.*
4. *Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.*⁶⁴

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu, *Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki*. Dari uairan diatas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah ijtihadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban *imam* tidak lepas dari *maqasidu syariah*, maka hak rakyat pun tidak lepas dari *maqasidu syariah* dalam arti yang seluas-lusanya. Apabila kita sebut hak *imam* adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.⁶⁵

2. Menurut Ulama Fiqh

Para ulama mengatakan bahwa membuat organisasi atau yayasan atau perkumpulan dalam rangka kebaikan adalah hal yang dibolehkan, selama tidak dijadikan sarana *ta'ashub* (fanatic kelompok), dan tidak dijadikan patokan *al wala wal bara'*. Syaikh Abu Hasan Al Ma'ribi mengatakan: "Disyariatkannya organisasi, yayasan, atau perkumpulan social adalah perkara yang tidak bisa diingkari oleh organisasi. Selama aktivitas Organisasi-organisasi tersebut dalam rangka menolong, membelanya dan

⁶⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 64

⁶⁵ *Ibid*

mendukung al-haq. Dengan syarat, anggotanya bebas dari sifat *ta'ashub* (fanatic kelompok) yang tercela, dan dari fitnah harta, dan hal-hal yang memperburuk dakwah di setiap tempat. Sementara kegiatan di organisasi ini hanya untuk pencitraan, padahal di balik itu ada perkataan-perkataan menyimpang seperti mencela para ulama karena mereka murji'ah atau jahmiyah atau mengatakan bahwa mereka itu berentangan dengan realita umat, atau organisasi yang menggiring manusia untuk fitnah terhadap para penguasa, lalu mulailah fitnah takfir dan berakhir dengan pembunuhan, penghalalan darah dan pengeboman, atau organisasi yang memerlukan anggotanya untuk berbai'at dan memecah belah kaum muslimin, maka organisasi yang demikian ini menyediakan semua bantuan untuk organisasi yang baik, dan tidak selayaknya para donator menyalurkan dana mereka pada organisasi-organisasi yang demikian".⁶⁶

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan: "Organisasi jika memang telah banyak menyebar di berbagai negeri Islam dan dibangun di dalam kerangka member bantuan dan di dalam kerangka saling tolong-menolong dalam mendukung dan taqwa antar sesama muslim, dapat diselipi dengan hawa nafsu, maka ini menjadi menguntungkan dan keberkahan. Dan manfaatnya sangat besar". Dan tidak benar sebagian besar orang menuduh orang yang ikut dalam organisasi Islami telah terjerumus dalam hizbiyah dan bid'ah yang tercela. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

⁶⁶ Yulian Purnama "Hukum Organisasi dan Taat Pada Pimpinan Organisasi" <https://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html>, di akses tanggal 28 Desember 2018.

mengatakan: “organisasi apapun yang dibangun dengan azas Islam yang shahih, yang hukum-hukumnya diambil dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah sesuai dengan apa yang diminta orang shalih, maka organisasi apapun yang dibangun dengan azas ini tidak perlu diingkarinya. Dan tidak ada alasan untuk menuduhnya dengan hizbiyyah. Karena ini semua termasuk di dalam firman Allah ta’ala: *“tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa”*. Dan saling tolong-menolong itu adalah tujuan yang syar’i. dan organisasi ini berbeda pendapat dari zaman ke zaman dan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu Negara ke Negara lain. Oleh karena itu menuduh organisasi yang memiliki azas demikian dengan mengklaim hizbiyyah atau bid’ah adalah hal yang tidak ada alasan untuk mengatakannya. Karena ini menyelisihi apa yang ditentukan oleh para ulama dalam perbedaan antara bid’ah yang disifati sesat dengan sunnah hasanah.”⁶⁷

3. Menurut Kaidah-kaidah Fiqh

Berikut ini adalah kaidah yang terdapat di dalam fiqh muamalah, yang menurut penulis sesuai dengan pembahasan tersebut, diantaranya yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*⁶⁸

Berdasarkan kaidah di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya hukum asal dari akad transaksi muamalah apapun bentuk dan modelnya, adalah

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, h. 138.

mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada.

Menurut kaidah fiqh yang berbunyi *أَلْضَّرُّ يُزَالُ* *Adh-Dhararu Yuzaalu* (Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin). Kaidah ini memiliki sudut pandang yang sedikit mirip dengan kaidah sebelumnya. Kaidah ini berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi di antara para hamba, dimana kemudharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba.⁶⁹ Sedangkan kaidah lain berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.*”

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.⁷⁰

Jadi berdasarkan kaidah tersebut bahwa pembubaran organisasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah itu diperbolehkan apabila organisasi masyarakat tersebut bisa mengancam keutuhan suatu Negara.

Pada masa Rasulullah ada dua kasus yang relevan yaitu, penyimpangan yang dilakukan *Musailamah al-kadzdzab* dan sikap nyeleneh *Dzul*

⁶⁹ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35.

⁷⁰ *Ibid*, h. 39.

Khuwaishirah setelah Perang Hunain yang kemudian hari menjadi cikal bakal gerakan menyimpang yaitu *Khawarij*. Menghadapi masalah demikian, yang dilakukan oleh nabi pertama kali adalah prinsip azas *tabayyun* (klarifikasi). Saat Rasulullah mendengar berita kemunculan nabi palsu di bumi Yamamah, ia segera mengirim utusan untuk membahas kebenarannya. Ia tidak gampang termakan isu, apalagi kasus penyimpangan agama memang hukumannya tergolong berat. Bahkan, kompilasi Musailamah datang ke Madinah, coba klarifikasi secara langsung masih dapat diandalkan untuk menyadarkannya. Selain klarifikasi, para pelaku juga diberi tugas untuk melakukan mediasi secara persuasif. Upaya ini dilakukan melalui jalur korespondensi dengan Musailamah. Kasus Dzul Khuwaishirah (8 H) yang mempertanyakan keadilan nabi dalam pembagian harta rampasan perang pun, oleh beliau diatasi dengan cara demikian. Saat Umar al-Faruq mau mengeksekusinya, Rasulullah segera mencegahnya agar tidak timbul fitnah yang bisa dimanfaatkan oleh musuh Islam.⁷¹

Dalam konteks ini, barangkali kita bisa merujuk pada alasan mengapa Nabi tidak memerangi orang-orang munafik. Orang-orang munafik jelas merupakan musuh-musuh Islam yang berada di dalam lingkungan umat Islam, berkumpul dan berbaur bersama mereka. Para sahabat jelas tidak tahu siapa saja orang-orang munafik yang berkumpul bersama mereka, namun Nabi mengetahui identitas mereka satu persatu. Lalu kenapa Rasulullah tidak memerintahkan para sahabat beliau untuk memerangi orang-orang munafik

⁷¹ Hidayatullah. Com, Cara Nabi Menanggulangi Ariran Menyimpang, <https://m.hidayatullah.com/artikel/tsaqofah/read/2017/11/18128303/cara-nabi-menanggulangi-aliran-menyimpang.html>, diakses tanggal 08 Maret 2019.

itu, padahal beliau mengetahui identitas masing-masing dari mereka. Ketika ditanya mengenai hal ini, Rasulullah menjawab: “Aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad itu mengajak kaum untuk berperang, tapi setelah dia menang, dia malah memerangi orang-orang yang telah membantunya itu.”⁷²

Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun. Pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad, dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan). Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam Perang Riddah ini.⁷³

Hal demikian juga yang dilakukan oleh Sayidina ‘Ali Ra, kendati menjabat sebagai khalifah dan berhadapan dengan kaum *Khawarij* yang tidak saja sesat, akan tetapi bertindak brutal dengan merampok dan membunuh, dan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk diperangi, akan tetapi Sayidina ‘Ali tidak serta merta memerangi mereka. Syaidina ‘Ali masih menasihati mereka, dan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat, sedangkan

⁷² Pondok Pesantren Sidogiri, Menghadapi Perbedaan dengan Elegan, <https://sidogiri.net/2018/09/menghadpi-perbedaan-dengan-elegan/> diakses tanggal 08 Maret 2019

⁷³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 36.

yang diperangi adalah sisa-sisa dari kelompok itu yang tidak mau berhenti berbuat kerusakan, tidak mau bertobat dan terus berkomitmen melawan pemerintah. Oleh sebab itu, ketika al-Imam hasan al-Bashri mendapatkan laporan tentang orang yang berpandangan seperti pandangan kelompok *Khawarij*, beliau juga tidak menginstruksikan untuk menyerang orang itu. Al-Imam Hasan al-Bashri malah menjawab: “Amal perbuatan lebih memberikan pengaruh kepada melebihi pandangan dan pemikiran. Allah akan memberikan balasan kepada manusia disebabkan amal perbuatan mereka”.⁷⁴

Barangkali pandangan semacam ini bisa lebih kita mengerti dengan memahami kebijakan Khalifah Umar bin Abul Aziz terkait dengan aliran sesat. Pada tahun 100 H, di Madinah muncul sekelompok aliran sesat yang dipimpin oleh Syaudzab. Maka Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada gubernurnya di Madinah untuk membiarkan mereka meyakini apapun, sepanjang keyakinan mereka tidak mendorong mereka pada tindakan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Bahkan dalam hal ini, Umar bin Abdul-Aziz berdakwah kepada Syaudzab melalui jalur debat ilmiah. Umar bin Abdul-Aziz meminta Syaudzab untuk mengirimkan orang terbaiknya guna berdebat dengannya mengenai akidahnya. Akhirnya Syaudzab mengirim dua orang terbaiknya dan berdebat dengan Umar bin Abdul-Aziz, dan akhirnya salah satu dari utusan Syaudzab itu meninggalkan keyakinannya, sedangkan yang lain tetap pada keyakinannya. Jadi dengan demikian, Umar bin Abdul-Aziz sebagai pemimpin pemerintahan Islam,

⁷⁴ Pondok Pesantren Sidogiri, Menghadapi Perbedaan dengan Elegan, <https://sidogiri.net/2018/09/menghadpi-perbedaan-dengan-elegan/> diakses tanggal 08 Maret 2019

tidak melakukan serangan apapun kepada aliran sesat yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ada banyak jalur lain yang masih bisa dilakukan untuk berdakwah kepada orang-orang yang berbeda faham agar kembali ke jalan yang benar. Menghadapi aliran sesat dengan kekerasan kadang membuat kelompok sesat itu semakin militan, sekaligus bisa mengundang simpati dari pihak lain untuk membantu aliran sesat itu, yang tentu bisa merugikan kepada umat Islam sendiri.⁷⁵

Kemudian pada masa Dinasti Bani Abbasyiah mengalami banyak perubahan, pada mulanya ibu kota negara adalah al-Hasyimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, al-Mansyur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, Bagdad, dekat ibu kota Persia, Ctesiphon, tahun 762 M. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini al-Mansyur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Dia mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menceritakan tradisi baru dengan mengangkat *Wazir* sebagai koordinator departemen, Wazir pertama yang diangkat adalah Kahlid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia.⁷⁶

Dia juga memebentuk lembaga protokol negara, sekertaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad ibn Abd al-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Badri Yatim, *Op. Cit.* h. 51.

negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa Dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa al-Mansyur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah.⁷⁷

Mengenai pembubaran atau penanganan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap radikal, Dinasti Bani Abassiyah melakukan tindakan dengan diadili oleh lembaga peradilan seperti kasus al-Halaj dan Abu Yazid al-Busthami yang di hukum mati karena dianggap menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. Fahaman tasawuf al-Halaj merupakan perkembangan dan bentuk lain dari fahaman *Ittihad*⁷⁸ yang diajarkan oleh Bayazid. Yang terpenting dari ajaran tasawuf al-Halaj yang menggoncang kaum ulama Islam terutama dikalangan ulama-ulama fiqh karena menurut sebagian orang banyak ajarannya yang bertentangan dengan aqidah dan syari'at Islam, adalah *Hulul*.⁷⁹ Dan karena fahamnya inilah antara lain mengapa ia dihukum bunuh.⁸⁰

⁷⁷ *Ibid*, h. 51.

⁷⁸ *Ittihad* yaitu bahwa tingkatan tasawuf seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. *Ittihad* merupakan suatu tingkatan dimana yang mencintakan dan yang dicintai telah menjadi satu.

⁷⁹ *Hulul* adalah fahaman yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya, setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan.

⁸⁰ Usman Said, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, (Medan: Naspar Djaja, 1981), h. 74-75.

Dalam perjalanan hidupnya ia pernah keluar masuk penjara akibat konflik dengan ulama fikih penganut madzab *Zahiri*.⁸¹ Pandangan-pandangan tasawuf yang agak ganjil menyebabkan ulama fikih bernama Ibn Daud al-Isfahani mengeluarkan fatwa untuk membantah dan memberantas pahamnya. Fatwa yang menyesatkan yang dikeluarkan oleh Ibn Daud itu sangat besar pengaruhnya terhadap diri al-Hallaj, sehingga al-Hallaj ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi setelah satu tahun dalam penjara, dia dapat meloloskan diri berkat bantuan seorang sipir penjara.⁸²

Dari Baghdad ia melarikan diri ke Sus, suatu wilayah yang terletak di Ahwaz. Setelah bersembunyi empat tahun lama di kota itu, dan tetap tidak merubah pendiriannya, akhirnya ia ditangkap kembali dan dimasukkan ke penjara selama delapan tahun lamanya. Lamanya di penjara ini tidak menyebabkan ia luntur pendiriannya. Akhirnya pada tahun 309 H (921 M) diadakan persidangan ulama di bawah pengawasan Kerajaan Bani Abbas, Khalifah Mu'tashim Billah. Dan akhirnya pada tanggal 18 Zulkaidah tahun 309 H (921 M) al-Hallaj dijatuhi hukuman mati. Ia dihukum bunuh, dengan terlebih dahulu dipukul dan dicambuk, lalu disalib, sesudah itu dipotong kedua tangan dan kakinya, dipenggal lehernya, dan ditinggalkan tergantung bagian-bagian tubuh itu di pintu gerbang kota Baghdad, dengan maksud untuk menjadi peringatan bagi ulama lainnya yang berbeda pendirian.⁸³

⁸¹ Madzab *Zahiri* adalah salah satu madzab fikih dan akidah dalam lingkup *Ahlus Sunah* yang mencapai masa jayanya semenjak abad ke-3 hingga ke-8 H. Pengikut madzab ini mengimani secara harfiah ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis sebagai satu-satunya sumber hukum Islam.

⁸² A. J. Arberry, *Pasang Surut Aliran Tasawuf*, (terj.) Haidar Bagir dari judul asli *Sufisme: An Account of the Mystics of Islam*, (Bandung: Mizan, 1985), cet.I, h. 77.

⁸³ *Ibid*, h. 77.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan, bahwasannya tentang pembubaran kelompok-kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu melalui proses peradilan, namun harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, hal ini berdasarkan surat An-nisa ayat 58 yaitu sebagai berikut;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa: 58).*⁸⁴

Peradilan menurut bahasa artinya ketetapan. Menurut syara' adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah/negara untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dan apabila yang dijadikan dasar adalah hukum Islam, maka disebut peradilan Islam. Sedangkan pengertian peradilan adalah tempat untuk mengadili suatu perkara. Orang yang bertugas mengadili suatu perkara disebut qadli (hakim).⁸⁵

Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah bahwa hukuman dalam Islam terdiri dari dua yaitu huduud (hukuman hadd) dan hukuman ta'zir. hukuman hadd ada tujuh macam yaitu: hadd zina, qadzaf, pencurian, hiraabah, pennggak minuman keras mencakup khamar dan segala minuman yang

⁸⁴ Departemen Agama, *Op., Cit*, h. 57.

Moh. Saifulloh Al Azis, *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 570.⁸⁵

memabukkan, dan qishash dan terakhir hukuman hadd murtad. Pembagian ini berdasarkan pertimbangan bahwa hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan Allah sehingga tidak boleh seorangpun melanggarnya. Jarimah ta'zir merupakan jarimah-jarimah yang jenisnya disebutkan dalam Al-Quran secara rinci, tetapi hukumannya sama sekali tidak disebutkan.⁸⁶

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan yang dianggap radikal dan mengancam keutuhan suatu negara merupakan bentuk jarimah ta'zir, yang dalam hal ini bentuk hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Quran secara rinci.

Pengertian Al-qadha atau sering disebut peradilan telah lama dikenal sejak dari zaman purba dan dia merupakan suatu kebutuhan hidup bermasyarakat. Tidak dapat suatu pemerintahan berdiri tanpa adanya peradilan. Karena peradilan itu adalah untuk menyelesaikan segala sengketa di antara para penduduk.⁸⁷ Peradilan adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan umum untuk mengadili dan memutuskan perkara antara dua orang atau lebih dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits.⁸⁸

Bentuk-bentuk wilayah peradilan dalam fikih Islam ada tiga bentuk wilayah peradilan, yaitu:

- a. Wilayah al-Qadha, yaitu lembaga peradilan dengan kekuasaan menyelesaikan berbagai kasus, disebut juga dengan peradilan biasa;

⁸⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta:1996, PT. Raja Grafindo Persada, h. 123.

⁸⁷ Tengku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 3.

⁸⁸ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h. 10.

- b. Wilayah al-Mazhalim, yaitu lembaga peradlan yang menangani berbagai kasus penganiayaan penguasa terhadap rakyat dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa dan perangkatnya;
- c. Wilayah al-Hisab, yaitu lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus pelanggaran moral dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.⁸⁹

Tidak ada seorangpun umat Islam selain Rasulullah sendiri yang mentasyri'kan hukum pada suatu keadian, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam langsung ditanyakan dan diberi kata putus oleh rasulullah, tidak ada masyarakat yang berani melakukan ijtihad sendiri. Rasululah memberi fatwa, menyelesaikan persengketaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan kadang dengan legitimasi satu atau beberapa ayat dari al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah swt, dan kadang-kadang dengan ijtihad Rasulullah yang bersandar kepada ilham dari Allah, atau berdasar pada petunjuk akal bahatsnya serta penetapan-penetapan terhadap masalah yang dimaksud. Hukum-hukum yang bersumber dari Rasulullah menjadi undang-undang bagi umat Islam yang wajib diikuti. Baik hal tersebut bersumber dari wahyu Allah maupun dari ijtihad Rasulullah sendiri.⁹⁰

Secara umum, Islam menyatakan seluruh kaum muslimin adalah bersaudara. Konsekuensi dari persaudaran itu maka Islam mewajibkan umat untuk saling tolong-menolong dalam al-Haq, seperti persaudaran kaum *Muhajirin* dan *Anshar*. Kaum Muhajirin adalah pengikut setia Nabi

⁸⁹ *Ibid*, h. 15

⁹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 37.

Muhammad yang melakukan hijrah atau pindah dari kota Mekah. Tentunya disini adalah para pengikut beliau yang telah masuk Islam.⁹¹ Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau berpindah dari tempat tinggal asalnya ke tempat tinggal yang baru. Kaum Muhajirin berpindah karena adanya kebencian dan amarah serta mendapat tekanan sekaligus perlawanan yang sangat hebat dari kaum kafir Qurays terhadap dakwah-dakwah serta ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw. tentang Islam. Mereka yang ikut bersama Nabi saw. rela meninggalkan harta, rumah, dan keluarganya untuk memulai hidup barunya bersama Rasulullah saw. demi Islam.⁹²

Dalam sejarahnya, kaum muslimin pernah hijrah sebanyak dua kali. Hijrah yang pertama dilakukan oleh umat Islam adalah ke Habasyah (sekarang Euthopia. Dan ini dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan Rajab tahun 615 M. pada waktu itu ada 14 orang (10 laki-laki dan 4 perempuan). Mereka adalah Usman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad, Abu Hudzaifah bin Uthbah bin Affan bersama istrinya, Sahlah Zubair bin Awwam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah beserta istrinya, Ummu Sulamah, Usman bin Madz'un dan Abdullah bin Mas'ud.⁹³

Anshar dalam kamus adalah adalah pembantu atau penolong, yaitu membantu perjuangan Nabi Muhammad dari kalangan penduduk madinah setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Anshar adalah

⁹¹ Nurrachman, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Nasional, 2011), 100

⁹² *Ibid.* h. 100.

⁹³ Muhammada Imran, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Nasional, 2011), h. 103.

penduduk asli kota Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin dengan suka cita. Kedatangan kaum Muhajirin dan Nabi Muhammad saw. sangat dinanti-nanti oleh kaum Ashar.⁹⁴

Sejak peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad semakin kesulitan menyiarkan agama Islam di Mekkah. Kesulitan menyiarkan agama Islam ini tetap disebabkan banyaknya tantangan dan hambatan oleh kafir Qurays. Melihat kenyataan tersebut orang Madinah memohon kepada Nabi dan pengikutnya untuk segera hijrah ke Madinah. Padamulanya Nabi Muhammad belum menerima usulan tersebut. Nabi Muhammad saw. khawatir peristiwa di Mekah terulang. Namun, permintaan itu berulang-ulang sehingga Nabi Muhammad saw. memutuskan berhijrah ke Madinah. Hal ini dijamin oleh orang-orang Muslim di Madinah.⁹⁵

Dalam Islam munculnya kelompok-kelompok seperti Syiah, Sunni, dan Khawarij dimulai sejak periode Ali sebagai khalifah. Saat periode Utsman berlalu dan Ali telah dibai'at sebagai khalifah oleh masa yang ada di Madinah, di pelopori oleh para revolusioner yang telah melakukan gerakan-gerakan. Namun, pembai'atannya belum mampu mengakhiri fitnah yang terjadi, bahkan justru membuat dunia Islam terbagi menjadi dua kubu besar yang pertama mendukung Ali dan yang kedua mendukung Muawiyah.⁹⁶

Ibnu Khaldun menceritakan tentang periode ini dengan ungkapannya, “Dan puncak perselisihan yang terjadi antara sahabat dan tabi'in merupakan

⁹⁴ Nurachman, *Op., Cit*, h. 103.

⁹⁵ Siti Rofiatun, *Pendidikan Umat Islam*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kementrian Pendidikan Nasional, 2011), h. 86.

⁹⁶ Dr. Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001), h. 31-32.

perbedaan ijthahs. Adapun dalam peristiwa Ali, faktanya bahwa umat Islam ketika terjadi pembunuhan Usman telah terpisah-pisah di wilayah, kemudian setelah itu mereka berselisih paham; Ali melihat bahwa pembai'atannya telah resmi berlaku, dan harus diakui oleh orang yang terlambat membai'at, dengan kesepakatan orang-orang yang telah berkumpul melaksanakan pembai'atan di Madinah, tempat tinggal Nabi saw. Dan kampung halaman para sahabat. Sedangkan yang berpendapat bahwa pembai'atannya tidak diakui karena adanya *Ahlul Halli wal 'Aqd* yang terpisah-pisah; yang berpendapat begini adalah Muawiyah, Amr ibnu Ash, Ummul Mu'minin Aisyah, dan lain-lain.⁹⁷

Di samping kedua kelompok tersebut, terdapat suatu kelompok ketiga yang minoritas, yaitu mereka yang tidak menemukan suatu bentuk kebenaran sehingga mereka absen dari pembai'atan, menjauhi massa, dan tidak ikut serta dalam peperangan; atau karena mereka mendapatkan kaum muslimin sedang dalam fitnah sehingga mereka berpendapat bahwa keadaan semestinya tenang dulu sebelum memikirkan persoalan khilafah. Di antara mereka adalah Saad bin Abi Waqash, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Abu said al-Khudri, Hasan bin Tsabit, Maslamah bin Mukhallad, Abdullah bin Salam, dan an-Nu'im bin Basyir *Radhiyallahu 'anhum*.⁹⁸

Sampai pada saat ini partai yang mendukung Ali masih terdiri dari orang-orang yang tidak lama kemudian menjadi Khawarij dengan orang-

⁹⁷ *Ibid*, h. 32.

⁹⁸ *Ibid*, h. 32.

orang yang kemudian dicap dengan Syi'ah. Akan lebih sesuai kiranya kalau kita gelari mereka semua dalam periode sejarah ini dengan nama pendukung Ali, sebab mereka mengikutinya karena mereka meyakini keutamaan yang dimilikinya, ilmunya, kedahuluannya masuk Islam dan masa lalunya dalam berjihad, serta kredibilitas dan kapabilitasnya ini di samping keistimewaannya sebagai kerabat Rasul saw. Adapun teori adanya teks akan haknya menduduki kekhilafahan dan usaha untuk memberi dalil terhadap restruksi hak berkuasa padanya dan keluarganya, hanya mengakui hubungan kerabat saja, dengan menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan dan ayat-ayat yang ditafsirkan, maka ini merupakan hal yang tidak pernah kita dengar pada periode ini, bahkan tidak pernah ada sama sekali. Hal itu merupakan kaidah dasar berdirinya madzhab partai Syi'ah dalam dimensi historis teknisnya.⁹⁹

Kemudian pengikut Ali terpecah menjadi dua kelompok utama yang besar, setelah suatu peristiwa yang berakibat dalam riskan dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa *Tahkim*. Maka salah satu dari kelompok tersebut membelot jadi lawan dan beralih menjadi partai pembangkang, yang berlebih-lebihan dalam mengecam dan memusuhinya, sebagaimana dulu telah berlebih-lebihan dalam kesetiannya; mereka itulah yang kemudian digelari al-Khawarij. Sedang kelompok kedua tetap loyal dan melipatgandakan kesetiannya kepada pemimpinnya, kemudian loyalitas ini terus berlanjut dalam sejarah dan generasi ini mewariskannya kepada anak

⁹⁹ *Ibid*, h. 33.

keturunan berikutnya, dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan *event* dan peristiwa, serta memunculkan berbagai teori. Dan mereka itulah yang kita sebut sebagai akar atau pangkal dari Syi'ah.¹⁰⁰

Aliran dalam Islam mulai tampak pada saat perang *Siffin* (37 H) khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah. Pada saat tentara Ali dapat mendesak tentara Mu'awiyah maka Mu'awiyah meminta diadakan perdamaian. Sebagian tentara Ali menyetujui perdamaian ini, dan sebagian lain menolaknya. Kelompok yang tidak setuju ini kemudian memisahkan diri dari Ali dan membentuk kelompok sendiri yang akhirnya terkenal dengan nama *Khawarij*. Mereka menganggap Ali, Mu'awiyah, dan orang-orang yang menerima perdamaian ini telah berbuat salah (dosa besar) karenanya mereka bukan mukmin lagi dan boleh dibunuh. Masalah dosa besar ini kemudian menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam yaitu, *Khawarij*, *Murji'ah*, dan *Mu'tazilah*. Masalah kepemimpinan ini kemudian menyebabkan munculnya kelompok yang menganggap yang berhak adalah Ali dan keturunannya (*Syiah*) dan kelompok yang berseberangan dengannya (*Ahlus Sunnah wal Jama'ah*). Dan akibat pengaruh agama lain dan filsafat pada umat Islam maka muncullah kelompok yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan perbuatannya (*Qadariyah*) dan kelompok yang berpendapat sebaliknya (*Jabariyah*).¹⁰¹

a. Khawarij

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 34.

¹⁰¹ Jadi Pintar.com, Sejarah Timbulnya Kelompok-kelompok dalam Islam dan Penyebabnya, <https://www.jadipintar.com/2014/06/Sejarah-Timbulnya-Kelompok-kelompok-dalam-Islam-dan-Penyebabnya.html?m=1>, di akses tanggal 06 Maret 2019.

Aliran *Khawarij* merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abu Bakar Ahmad al-Syahrastani, bahwa yang disebut *Khawarij* adalah setiap orang yang keluar dari Imam yang hak dan telah disepakati para jama'ah, baik ia keluar pada masa sahabat khulafaurrasidin, atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Menurut bahasa, nama *Khawarij* ini berasal dari kata *kharaja* yang berarti keluar dari barisan Ali.¹⁰²

b. Aliran Murji'ah

Nama *Murji'ah* diambil dari kata *irja* atau *arja'a* yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata *arja'a* mengandung pula arti memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, *arja'a* berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dan iman. Oleh karena itu, *Murji'ah* artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa yaitu Ali dan Muawiyah serta masukannya masing-masing ke hari kiamat kelak.¹⁰³

c. Aliran Syi'ah

Arti *Syi'ah* dalam bahasa Arab adalah pengikut. Sedangkan arti kaum *Syi'ah* menurut istilah yang dipakai dalam lingkungan umat Islam ialah kaum yang beri'tiqad bahwa sayidina 'Ali adalah orang yang

¹⁰² Abuddin Nata, *Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 29.

¹⁰³ M. Yusran Asmuni, *Ilmu Tauhid*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 108.

berhak menjadi khalifah pengganti nabi. Karena nabi berwasiat bahwa pengganti beliau sesudah wafat adalah sayidina ‘Ali.¹⁰⁴

d. Aliran Qadariyah

Lafadz *Qadariyah* berakar dari *qadara* yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, *Qadariyah* adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-pebuatannya. Dalam paham *Qadariyah*, manusia manusia dipandang mempunyai qodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada *qodo* dan *qodar* Tuhan.¹⁰⁵

e. Aliran Jabariyah

Nama *Jabariyah* berasal dari kata *jabara* yang mengadnung arti memaksa. Sedangkan menurut as-Syahrastani bahwa *Jabariyah* berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada allah swt. Dalam istilah Inggris, paham *Jabariyah* disebut *fatalisme* atau *predestination*, Yaitu paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia ditentukan semula oleh *qada* dan *qadar* Tuhan. Dengan demikian posisi manusia dalam paham ini tidak memiliki kebebasan dan inisiatif sendiri, tetapi terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Oleh karena itu aliran *Jabariyah* ini menganut paham

¹⁰⁴ Sirajuddun Abbas, *I'tiqad Ahlussunah Wal Jama'ah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), h. 277.

¹⁰⁵ Abudin Nata, *Op., Cit*, h. 122.

bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini betul melakukan perbuatan, tetapi perbuatannya itu dalam keadaan terpaksa.¹⁰⁶

f. Aliran Mu'tazilah

Lafadz *Mu'tazilah* berasal dari kata *i'tizal* yang artinya memisahkan diri, pada mulanya nama ini diberikan kepada orang dari luar *Mu'tazilah* karena pendirinya Washil bin Atha' tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya, Hasan al-Bashri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut *Mu'tazilah* dan digunakan sebagai nama dari aliran teologi mereka.¹⁰⁷

Perkembangan gerakan Islam yang terjadi di Timur Tengah seringkali memberikan pengaruh yang kuat bagi gerakan Islam di Tanah Air. Timur Tengah yang dipersepsikan sebagai pusat Islam selalu menjadi rujukan bagi gerakan Islam di Indonesia. Gagasan, pemikiran serta gerakan di Timur Tengah memiliki daya tarik yang kuat, sehingga dengan mudah dianut, disosialisasikan dan dipraktikkan di Indonesia.¹⁰⁸

Kebangkitan Islam (*Islamic Resurgence*) menurut Candra Muzaffar merupakan suatu gerakan yang mengacu pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali, karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang; Islam dianggap sebagai satu-satunya

¹⁰⁶ Sirajuddin Abbas, *Op., Cit.*, h. 277.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 202.

¹⁰⁸ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 71

kekuatan alternatif memperbaiki kekuatan umat yang sedang mengalami keterpurukan. Candra berpendapat bahwa kebangkitan Islam sudah dimulai sejak abad ke-19 M. dan terus menunjukkan gairahnya pada awal abad ke-20 M. dengan tokoh-tokoh awalnya dipelopori oleh Jamaludin Al-Afghani, Moh. Abduh, Rasyid Ridha, dan lain-lain hingga berpengaruh sampai di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.¹⁰⁹

Sebagai kekuatan masyarakat yang terorganisasi, ormas Islam secara teoritis memiliki beberapa kekuatan. Organisasi kemasyarakatan Islam memiliki keabsahan eksistensial dan moral. Eksistensi ormas Islam mempunyai legitimasi teologis, sosiologis, dan politis. Di samping itu, ormas Islam merupakan potensi-potensi pembangunan. Penguatan potensi-potensi tersebut dapat menjadi pilar bagi pengembangan demokrasi dan demokratisasi dalam kerangka politik pembangunan. Oleh karena itu, organisasi-organisasi kekuatan masyarakat, baik dalam bidang agama, politik, maupun sosial-kemasyarakatan, dituntut mampu untuk memfungsikan diri sebagai agen reformasi sosial dan agen artikulasi kepentingan masyarakat. Penunaian fungsi ini tidak hanya merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial, tapi juga merupakan kontribusi dalam pengembalian kedaulatan rakyat.¹¹⁰

Sebagian besar studi tentang aktivisme Islam masih terisolasi dari begitu banyak perkembangan teoritis dan konseptual yang muncul dari penelitian tentang gerakan sosial dan politik perseteruan. Sebaliknya,

¹⁰⁹ Saiful Muzani, *Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1999, h. 34.

¹¹⁰ DR. M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT Logos Wacana, 2002), h. 124-125.

sebagian besar publikasi tentang aktivisme Islam lebih merupakan analisis deskriptif tentang ideologi, struktur dan tujuan-tujuan dari beragam aktor Islam atau sejarah gerakan-gerakan tertentu. Dinamika-dinamika sosiologis yang lain masih tetap tidak dikaji atau diremehkan sebagai sesuatu yang bergantung pada orientasi ideologis Islam yang unik., dan dengan demikian secara implisit mengesensialkan aktivisme Islam sebagai sesuatu yang tidak dapat dipahami secara komparatif dan mengekalkan keyakinan tentang eksepsionalisme Islam. Ketika analisis komparatif digunakan (di luar kajian atas beragam contoh aktivisme Islam), ia umumnya terbatas pada perbandingan dengan fundamentalisme-fundamentalisme keagamaan lain yang sama-sama memiliki fondasi ideologis dan orientasi keagamaan yang mirip, dan dengan demikian menegaskan keterbandingan gagasan dan bukan mekanisme aktivisme. Akibatnya, bahwa karya keserjanaan tersebut cenderung mengabaikan berbagai perkembangan dalam penelitian gerakan sosial yang dapat memberikan sumbangan teoritis pada banyak isu yang relevan dengan aktivisme Islam.¹¹¹

¹¹¹ Quintan Wiktorowicz, *Aktivisme Islam (Pendekatan Teori Gerakan Sosial)*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), h. 24.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Prosedur Mendirikan Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan. Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, dan Ormas dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.¹¹²

Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota dan Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.¹¹³

Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan:

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
2. Program kerja;
3. Sumber pendanaan;
4. Surat keterangan domisili;
5. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
6. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.¹¹⁴

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

¹¹² Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹¹³ Pasal 11 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹¹⁴ Pasal 12 Ayat 1 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.¹¹⁵

Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun. Wadah berhimpun tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.¹¹⁶

Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.¹¹⁷

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
2. Program kerja;
3. Susunan pengurus;
4. Surat keterangan domisili;
5. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;

¹¹⁵ Pasal 12 Ayat 2 dan 3 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹¹⁶ Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹¹⁷ Pasal 15 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
7. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.¹¹⁸

Surat keterangan terdaftar diberikan oleh:

1. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
2. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
3. Bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.¹¹⁹

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan. Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.¹²⁰

Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Pendataan Ormas dilakukan oleh camat atau sebutan lain.

Pendataan Ormas meliputi:

1. Nama dan alamat organisasi;

¹¹⁸ Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹¹⁹ Pasal 16 ayat 3 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹²⁰ Pasal 17 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

2. Nama pendiri;
3. Tujuan dan kegiatan; dan
4. Susunan pengurus.¹²¹

B. Prosedur Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Dalam perubahan Undang-undang yang terbaru tentang Ormas bahwasanya dijelaskan bentuk-bentuk larangan terhadap ormas diantaranya sebagai berikut:

1. Menggunakan, nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintahan.
2. Menggunakan dengan tanpa izin, nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama,, lambang, bendera Ormas.
3. Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
4. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
5. Mengumpulkan dana untuk partai politik.
6. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa tau golongan.
7. Melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

¹²¹ Pasal 18 Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

8. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas social, dan/atau,
9. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Menggunakan nama, lambang, bendera atau symbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau symbol organisasi gerakan sepratis atau organisasi terlarang.
11. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau,
12. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.¹²²

Dalam hal penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ormas di atur sebagai berikut yaitu, Ormas yang melanggar ketentuan dijatuhi sanksi administratif.¹²³ Ketentuan yang dimaksud yaitu kewajiban organisasi kemasyarakatan:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat
4. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat

¹²² Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 Ayat 1 sampai Ayat 4.

¹²³ Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 60 Ayat 1

5. Melakukan pengelolaan keuangan serta transparan dan akuntabel, dan
6. Berpartisipasi dalam pencapaian Negara.¹²⁴

Sementara ketentuan yang lainnya yaitu tentang kewajiban Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing, yaitu sebagai berikut:

1. Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan
3. Menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.
4. Memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.
5. Mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana, dan
6. Membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.¹²⁵

Ormas yang melanggar ketentuan dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.¹²⁶ Ketentuan yang dimaksud yaitu tentang larangan yang diberikan kepada Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia
3. Melakukan kegiatan inteljen
4. Melakukan kegiatan politik

¹²⁴ Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 21

¹²⁵ Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 51

¹²⁶ Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 60 Ayat 2

5. Melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatic
6. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi
7. Menggalang dana dari masyarakat Indonesia
8. Menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.¹²⁷

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan/atau, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Terhadap ormas yang didirikan oleh warga Negara asing selain dikenakan sanksi administratif juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri, atau pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melakukan pencabutan, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.¹²⁸

Peringatan tertulis diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

¹²⁷ Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 52

¹²⁸ Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 61

hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat badan hukum.¹²⁹



¹²⁹ Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 62

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pembubaran Ormas Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Ormas di Indonesia

Setelah lahirnya Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengalami banyak perubahan tentang proses pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, regulas ini memungkinkan pemerintah membubarkan ormas yang dinilai terbukti anti-Pancasila tanpa melalui proses peradilan.

Pengaturan tentang Ormas yang terdapat dalam Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang ormas dianggap tidak memadai untuk membubarkan organisasi yang dinilai anti-Pancasila. Dalam Undang-undang No 16 tahun 2017 lembaga yang memberikan izin dan mengesahkan ormas diberikan kewenangan untuk mencabut izin tersebut manakala ormas tersebut sudah terbukti melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan mencabut izin apabila ormas tersebut terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Padahal peraturan tentang pembubaran ormas yang terdapat dalam Undang-undang No 17 tahun 2013 mengenai ketentuan sanksi bagi ormas yang terbukti melanggar dijelaskan secara detail dalam pasal 60 sampai pasal 82.

Dalam hal ini, ormas yang terbukti melanggar ketentuan dapat dijatuhi sanksi administrative atau sanksi tertulis, jika ormas tidak menghiraukan selama tiga kali maka pemerintah dapat menghentikan sementara kegiatan ormas tersebut yang dinilai melanggar ketentuan. jika sanksi tersebut masih saja tidak dihiraukan maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan izin atau status badan hukum. Dalam proses pencabutan izin atau status badan hukum dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pembubaran ormas berbadan hukum ke pengadilan oleh kejaksaan hanya atas dasar permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan HAM.¹³⁰

Sementara dalam Undang-undang No 16 tahun 2017 peringatan tertulis hanya diberikan satu kali bagi ormas yang terbukti melakukan pelanggaran berbedan dengan yang terdapat dalam Undang-undang No 17 tahun 2013 yang memberikan peringatan sebanyak tiga kali. Jika ormas tidak menghiraukan peringatan tersebut maka Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan sanksi penghentian kegiatan. Bahkan Menteri Hukum dan HAM dapat mencabut izin atau status badan hukum ormas tersebut tanpa melalui proses pengadilan.¹³¹

Karena ketentuan mengenai putusan pengadilan yang diisyaratkan guna membubarkan ormas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 68 Undang-undang no 17 tahun 2013 telah di hapus atau sudah tidak tercantum dalam Undang-undang No 16 tahun 2017.

¹³⁰ Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 70.

¹³¹ Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 62

Adapun larangan-larangan yang ditujukan terhadap ormas dalam Undang-undang No 16 tahun 2017 yaitu, menggunakan, nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintahan, menggunakan dengan tanpa izin, nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga/badan international menjadi nama,, lambang, bendera Ormas, dan menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik, menggunakan nama, lambang, bendera atau symbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau symbol organisasi gerakan sepsratis atau organisasi terlarang. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.¹³²

Dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang No 16 tahun 2017 yaitu, menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang brtentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau, mengumpulkan dana untuk partai politik, melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa tau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas social,

¹³² Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 Ayat 1 sampai Ayat 4.

dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang No 16 tahun 2017 juga diatur tentang larangan-larangan yang ditujukan kepada ormas yang didirikan oleh warga Negara asing yaitu, melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan inteljen, melakukan kegiatan politik, melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatic, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi, menggalang dana dari masyarakat Indonesia, dan menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.

Sanksi juga dapat dijatuhkan terhadap ormas yang melanggar kewajibannya sebagai organisasi kemasyarakatan, kewajiban-kewajiban ormas meliputi, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan serta transparan dan akuntabel, dan berpartisipasi dalam pencapaian Negara.

Sementara kewajiban yang diberikan kepada ormas yang didirikan oleh warga Negara asing yaitu, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan, menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku

dalam masyarakat Indonesia, memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana, dan membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media masa berbahasa Indonesia.¹³³

B. Pembubaran Ormas Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Ormas Menurut Pandangan Islam

Membentuk organisasi atau perkumpulan adalah perkara Muamalah dan Muamalah itu hukum asalnya mubah, dimana apabila tidak ada nash yang melarang maka perbuatan itu dianggap mubah atau diperbolehkan. Membentuk kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasinya melalui kelompok-kelompok tersebut.

Alasan diperbolehkannya membentuk suatu kelompok dalam Islam dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam seperti, keadilan, toleransi, tolong menolong, kebebasan dan kemerdekaan, persamaan, serta prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dalam Islam munculnya kelompok-kelompok seperti Syiah, Sunni, dan Khawarij dimulai sejak periode Ali sebagai khalifah. Saat periode Utsman berlalu dan Ali telah dibai'at sebagai khalifah oleh masa yang ada di Madinah, di pelopori oleh para revolusioner yang telah melakukan gerakan-gerakan. Namun, pembai'atannya belum mampu mengakhiri fitnah yang terjadi, bahkan

¹³³ Undang-undang No 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 51

justru membuat dunia Islam terbagi menjadi dua kubu besar yang pertama mendukung Ali dan yang kedua mendukung Muawiyah.¹³⁴

Dari sinilah munculnya kelompok-kelompok dalam Islam, ada kelompok yang yang dianggap ekstrem ada juga kelompok yang muncul karena bertujuan untuk mengambil jalan tengah. Namun dalam perjalanannya banyak anggota atau tokoh dari kelompok yang di anggap berbahaya oleh penguasa, kemudian di hukum.

Hal demikian juga yang dilakukan oleh Sayidina 'Ali Ra, kendati menjabat sebagai khalifah dan berhadapan dengan kaum *Khawarij* yang tidak saja sesat, akan tetapi bertindak brutal dengan merampok dan membunuh, dan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk diperangi, akan tetapi Sayidina 'Ali tidak serta merta memerangi mereka. Syaidina 'Ali masih menasihati mereka, dan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat, sedangkan yang diperangi adalah sisa-sisa dari kelompok itu yang tidak mau berhenti berbuat kerusakan, tidak mau bertobat dan terus berkomitmen melawan pemerintah. Oleh sebab itu, ketika al-Imam hasan al-Bashri mendapatkan laporan tentang orang yang berpandangan seperti pandangan kelompok *Khawarij*, beliau juga tidak menginstruksikan untuk menyerang orang itu. Al-Imam Hasan al-Bashri malah menjawab: “Amal perbuatan lebih memberikan pengaruh kepada melebihi pandangan dan pemikiran. Allah akan memberikan balasan kepada manusia disebabkan amal perbuatan mereka”¹³⁵.

¹³⁴ Dr. Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001), h. 31-32.

¹³⁵ Pondok Pesantren Sidogiri, Menghadapi Perbedaan dengan Elegan, <https://sidogiri.net/2018/09/menghadpi-perbedaan-dengan-elegan/> diakses tanggal 08 Maret 2019

Barangkali pandangan semacam ini bisa lebih kita mengerti dengan memahami kebijakan Khalifah Umar bin Abul Aziz terkait dengan aliran sesat. Pada tahun 100 H, di Madinah muncul sekelompok aliran sesat yang dipimpin oleh Syaudzab. Maka Umar bin Abdul Azis menginstruksikan kepada gubernurnya di Madinah untuk membiarkan mereka meyakini apapun, sepanjang keyakinan mereka tidak mendorong mereka pada tindakan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Bahkan dalam hal ini, Umar bin Abdul-Aziz berdakwah kepada Syaudzab melalui jalur debat ilmiah. Umar bin Abdul-Aziz meminta Syaudzab untuk mengirimkan orang terbaiknya guna berdebat dengannya mengenai akidahnya. Akhirnya Syaudzab mengirim dua orang terbaiknya dan berdebat dengan Umar bin Abdul-Aziz, dan akhirnya salah satu dari utusan Syaudzab itu meninggalkan keyakinannya, sedangkan yang lain tetap pada keyakinannya. Jadi dengan demikian, Umar bin Abdul-Aziz sebagai pemimpin pemerintahan Islam, tidak melakukan serangan apapun kepada aliran sesat yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ada banyak jalur lain yang masih bisa dilakukan untuk berdakwah kepada orang-orang yang berbeda faham agar kembali ke jalan yang benar. Menghadapi aliran sesat dengan kekerasan kadang membuat kelompok sesat itu semakin militan, sekaligus bisa mengundang simpati dari pihak lain untuk membantu aliran sesat itu, yang tentu bisa merugikan kepada umat Islam sendiri.¹³⁶

¹³⁶ *Ibid.*

Dalam Islam mengenai keputusan hukum pada masa Rosululah dan khulafaurasidin sepenuhnya dalam kekuasaan khalifah. Namun berjalannya waktu dibentuklah lembaga peradilan dalam Islam yang khusus berwenang mengadili permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan hakim dari peradilan tersebut diangkat oleh khalifah itu sendiri.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur proses pembubaran ormas yaitu dengan memberikan peringatan tertulis namun hanya satu kali, kemudian jika ormas tidak menghiraukan peringatan tersebut maka Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan sanksi penghentian kegiatan, bahkan Menteri Hukum dan HAM dapat mencabut izin atau status badan hukum ormas tersebut tanpa melalui proses pengadilan.
2. Dalam Islam mengenai pembubaran organisasi masyarakat tidak diatur secara jelas, namun dalam praktiknya, setiap perkara itu diputus melalui proses peradilan. Pada masa Rosulullah dan Sahabat, khalifah sendiri yang memutus setiap perkara, namun untuk periode selanjutnya kewenangannya diserahkan kepada hakim yang sudah diangkat oleh khalifah.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai proses penyusunan Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan diharapkan adanya regulasi dan control yang tegas, terutama mengenai proses pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

2. Dalam hal mengenai penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan, diharapkan bisa mengedepankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam

\



DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Arberry, *Pasang Surut Aliran Tasawuf*, (terj.) Haidar Bagir dari judul asli *Sufisme: An Account of the Mystics of Islam*, Bandung: Mizan, 1985.
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Agus Sulistyono Dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cv. Surakarta, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Abuddin Nata, *Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Mustafa, *Akhlak-Tasawuf*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- BBC News, HTI dinyatakan ormas terlarang, Pengadilan tolak gugatan, <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/Indonesia/amp/Indonesia-44026822>, diakses tanggal 05 Maret 2019.
- Delier Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 M*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Alfatih*, Jakarta: Pt. Insan Media Pustaka, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Faisal Ismail, *Dileman NU, Ditengah Badai Pragmatisme Politik*, Cet. 1; Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2004.

Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: AMZAH, 2005.

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, ;[

Hamka, *Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Hidayatullah. Com, Cara Nabi Menanggulangi Ariran Menyimpang, <https://m.hidayatullah.com/artikel/taqofah/read/2017/11/18128303/cara-nabi-menanggulangi-aliran-menyimpang.html>, diakses tanggal 08 Maret 2019.

Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, (Bogor: Al-Izzah Press, 2002.

Jadi Pintar.com, Sejarah Timbulnya Kelompok-kelompok dalam Islam dan Penyebabnya, <https://www.jadipintar.com/2014/06/Sejarah-Timbulnya-Kelompok-kelompok-dalam-Islam-dan-Penyebabnya.html?m=I>, di akses tanggal 06 Maret 2019.

Kajian, Volume 10, masalah 3, *pusat pengkajian dan pelayanan informasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perakilan Rakyat RI*, 2005

Karel A. Steenbrik, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES. 1974.

Kompas.com, Ini tiga pertimbangan Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>, diakses tanggal 07 Desember 2018.

M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* Jakarta: Erlangga, 2005.

- M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: PT Logos Wacana, 2002.
- M. Din Syamsudin, *Muhammadiyah Kiri dan Esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* Jakarta: Erlangga, 2005.
- M. Yusran Asmuni, *Ilmu Tauhid*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya pada kasus-kasus Hukum Islam*, Bandar Lampung: Anggota Ikapi, 2016.
- Moh. Saifulloh Al Azis, *Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001
- Muhammada Imran, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Nasional, 2011.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, AL-‘ADALAH Vol. XII, No 1. Juni 2014.
- Muhammad Thalhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Nurrachman, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Nasional, 2011.
- Pondok Pesantren Sidogiri, Menghadapi Perbedaan dengan Elegan, <https://sidogiri.net/2018/09/menghadpi-perbedaan-dengan-elegan/> diakses tanggal 08 Maret 2019
- Quintan Wiktorowicz, *Aktivisme Islam (Pendekatan Teori Gerakan Soisal)*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000

Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013.

Saiful Muzani, *Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1999.

Siti Rofiatun, *Pendidikan Umat Islam*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.

Sirajuddun Abbas, *I'tiqad Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*, Jakarta Selatan: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Usman Said, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, Medan: Naspar Djaja, 1981.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedai bebas, Organisasi Masa, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi masa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_masa), diakses tanggal 06 Maret 2019.

Yulian Purnama "Hukum Organisasi dan Taat Pada Pimpinan Organisasi" <https://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html>, di akses tanggal 28 Desember 2018.